

**ANALISIS BELANJA DAERAH DAN FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI
KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH
PERIODE 2004-2009**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RIDHO ARGI
NIM. C2B606046

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ridho Argi
Nomor Induk Mahasiswa : C2B606046
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS BELANJA DAERAH
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DI
KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2004-2009**
Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, SE, Msi

Semarang, Mei 2011

Dosen Pembimbing

(Dr. Hadi Sasana, SE, Msi)

NIP. 196901211997021001

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ridho Argi
Nomor Induk Mahasiswa : C2B606046
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS BELANJA DAERAH
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA DI
KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2004-2009**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Juni 2011

Tim Penguji :

1. Dr. Hadi Sasana, SE, Msi. (.....)
2. Prof. Drs. Waridin, Ms, Ph.D (.....)
3. Achma Hendra Setiawan, SE, MSi. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ridho Argi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS BELANJA DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2004-2009 , adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Mei 2011

Yang membuat pernyataan,

Ridho Argi
NIM: C2B606046

ABSTRACT

Local expenditure of all local government spending in a budget period. Local expenditure is part of the spending areas, where expenditure consists of direct expenditure and indirect expenditure. For the revenue areas consists of Original Local Revenue, balance funds, and other legitimate income.

This study aims to prove empirically the influence of Original Local Revenue and balance funds, to local expenditure in regency and city at Central Java.

This study used quantitative data. with the type of time series data and cross section data (panel data) in the form of an annual. Time series data starting from the period 2004 to 2009, while its cross section data are 35 district and city district of Central Java Se. From the merger of two kinds of data has yielded 210 observations. The instrument used is the regression Pooled Data study.

Result of this study indicates that the Original Local Revenue and balance funds have significant impact on local expenditure.

Key words: Local Expenditure, Original Local Revenue, Balance Funds, and Pooled Data

ABSTRAK

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran. Belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, dimana pengeluaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk penerimaan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan yang sah lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. dengan jenis *time series data* dan *cross section data* (data panel) dalam bentuk tahunan. Data *time series* yang digunakan dimulai dari periode 2004 sampai 2009, Sedangkan data *cross section*-nya adalah 35 daerah Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah. Dari penggabungan dua jenis data tersebut telah menghasilkan 210 observasi. Alat yang digunakan penelitian adalah regresi panel data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Kata kunci : Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan Panel Data.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS BELANJA DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2004-2009”**.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs Moh Nasir, Msi, akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Hadi Sasana. SE, Msi, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya atas bimbingan, arahan, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc, Ph.D selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi UNDIP.

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi UNDIP, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tuaku atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT akan membalasnya, serta adikku tercinta Rezkya Argita, terima kasih atas doa dan dukungannya.
7. Teman-teman seperti Amy, Indra, Azzi, Rizal (miyek), Fajar, Cahyo, Rea, Edith, Dyke, Pramudana (doyok), Nasrul, Putra, Primasari, Ganis, Sandra, Dita, Archi, Taufik, Ucok, dan semua teman IESP 2006.
8. Teman-teman KS 09 (Rangga, Bang Agi, Febri, Ginanjar, Aji, Rizky, Arif, Christian Wayangkau) terima kasih.

Penulis sadar dalam penulisan laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat saya harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan hasil penelitian ini, dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, April 2011

Penulis

Ridho Argi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Otonomi Daerah.... ..	10
2.1.2 Belanja Daerah	11
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.4 dana Perimbangan	15
2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.8 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah.....	20
2.1.9 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22

	2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III	METODELOGI	28
	PENELITIAN.....	
	3.1 Variabel dan Definisi Operasional	28
	3.2 Jenis dan Sumber Data	29
	3.3 Metode Pengumpulan Data	29
	3.4 Metode Analisis	30
	3.5 Pengujian Asumsi Klasik.....	32
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
	4.1 Diskripsi Objek Penelitian	38
	4.1.1 Keadaan Geografis.....	44
	4.1.2 Perkembangan dana perimbangan.....	48
	4.1.3 Pendapatan asli daerah	51
	4.1.4 Perkembangan belanja daerah.....	
	4.2 Analisis Data.....	45
	4.2.1 Uji R^2	45
	4.2.2 Uji Statistik t.....	46
	4.2.3 Uji F	47
	4.3 Pengujian Asumsi Klasik	48
BAB V	PENUTUP	53
	5.1 Kesimpulan	53
	5.2 Keterbatasan	53
	5.3 Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2005-2009.....	5
Tabel 1.2 Total PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah 2005-2009.....	6
Tabel 4.1 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah 2004-2009.....	40
Tabel 4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah 2004-2009.....	42
Tabel 4.3 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah 2004-2009.....	44
Tabel 4.4 Hasil Regresi Utama.....	46
Tabel 4.5 Tabel Nilai t-statistik.....	47
Tabel 4.6 Auxiliary Regression.....	48
Tabel 4.7 Resid ²	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner.....	19
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran Analisis Belanja Daerah.....	26
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Durbin Watson	33
Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Durbin Watson.....	33
Gambar 3.3 Pengujian hipotesis Secara Searah (one tail test) $\alpha = 0,05$	37

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Data Mentah.....	59
LAMPIRAN B	Regresi Utama.....	60
LAMPIRAN C	Uji Normalitas.....	61
LAMPIRAN D	Uji Multikolinieritas 1.....	62
LAMPIRAN E	Uji Multikolinieritas 2.....	63
LAMPIRAN F	Uji Heterokedasrisitas.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Kebijakan desentralisasi telah menjadi pilihan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya tidak terkecuali di Indonesia (Hariyanto, 2005).

Menurut Cardiman (2006) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka paradigma peyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim dalam Rahmawati (2010) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah

melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebelum era otonomi daerah, struktur anggaran daerah (APBD) yang berlaku adalah anggaran berimbang, dimana anggaran penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja (Saragih, 2003). Di era otonomi daerah, struktur APBD mengacu pada pendapatan masing-masing daerah sehingga tiap-tiap daerah struktur APBD-nya akan berbeda dengan daerah lain tergantung dari kapasitas keuangan yang dimilikinya (Cardiman, 2006).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Rahmawati, 2010).

Deddi Nurdiawan (2006) mengatakan yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan

selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga terdapat campur tangan dari pemerintah pusat di masa lalu mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan pemerataan, prinsip demokrasi, keistimewaan dan kekhususan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Suwandi dalam Hariyanto (2005) salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melakukan otonomi dan desentralisasi, yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja daerahnya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan

terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (dalam Dwirandra, 2006). Jadi, PAD harus menjadi basis utama penerimaan daerah dibandingkan dengan DAU agar daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya.

Hal ini dapat terlihat di Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintahan yang masing-masing berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Setiap pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah, atau yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain komponen komponennya terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain-lainnya yang sah.

Menurut Edison (2006) sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah.

Akan tetapi ada fakta bahwa daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung jika hanya menggandakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan dalam keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan (Hariyanto, 2005).

Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur serta rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya (Rahmawati, 2010). Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari APBD, yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran.

Berikut ini akan disajikan mengenai jumlah belanja daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah dari tahun 2005 hingga 2009.

Tabel 1.1
Total Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (dalam juta rupiah)

Tahun	Belanja Daerah
2005	12.900.000
2006	17.099.000
2007	22.485.000
2008	26.910.000
2009	28.338.000

Sumber : BPS Jateng, 2010, diolah

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2005 hingga 2009 terjadi peningkatan jumlah belanja daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Warsito ,dkk dalam Rahmawati (2010) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan

rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Halim dalam Rahmawati (2010) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja daerah di masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat. Berikut akan disajikan mengenai PAD, dana perimbangan kabupaten dan kota Jawa Tengah periode 2005 hingga 2009.

Tabel 1.2
Total PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah
Periode 2005-2009 (dalam juta rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2005	1.467.169	11.321.000
2006	1.902.249	17.159.000
2007	2.104.439	18.987.000
2008	2.248.225	20.844.000
2009	2.303.144	22.219.000

Sumber : BPS Jateng, 2010, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 memperlihatkan kecenderungan meningkat dari periode tahun 2005 hingga 2009 pada PAD dan dana perimbangan. Kedua potensi tersebut memiliki kecenderungan pada tren yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap pengeluaran akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat (Edison, 2006). Hal ini tidak terlihat dalam Tabel 1.2, dimana perkembangan PAD lebih kecil dibandingkan dana perimbangan yang selalu mengalami peningkatan secara signifikan. Jadi sumbangan antara PAD dan dana perimbangan Terhadap belanja daerah cenderung lebih dominan dipengaruhi oleh dana perimbangan.

Berdasarkan kondisi dan latar belakang masalah tersebut dimana belanja daerah dapat dipengaruhi oleh PAD dan dana perimbangan. Adanya pemikiran tersebut, maka dalam rangka penyusunan skripsi ini dipilih judul” *Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009* ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah pembiayaan belanja daerah dengan PAD dan dana perimbangan yang selalu meningkat tiap tahunnya memiliki perbedaan, dimana dana perimbangan memiliki sumbangan yang sangat signifikan dibandingkan PAD. Sebagaimana pendapat Edison (2006) prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap pengeluaran akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Hal ini berbeda dengan situasi di kabupaten dan kota Jawa Tengah, penggunaan dana perimbangan lebih besar ketimbang PAD yang

menjadikan dana perimbangan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap belanja daerah. Dengan adanya pernyataan tersebut PAD dan dana perimbangan telah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan untuk penelitian analisis belanja daerah di Kabupaten dan kota Jawa Tengah ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap belanja daerah ?
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja daerah.
2. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh dari variabel PAD dan dana perimbangan dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di 29 Kabupaten dan 6 Kota di daerah Jawa Tengah pada periode 2004 sampai dengan 2009, dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan terutama pemerintah daerah.
3. Menambah khasanah ilmu tentang menganalisa suatu masalah dalam hal ini tentang APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang diadakannya penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dari penelitian serta manfaat dari penelitian secara teoritis maupun praktis. Pada bagian akhir bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Bab Telaah Pustaka yang berisi antara lain, teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

Bab III merupakan Bab Metodologi Penelitian, dalam Bab ini akan dijelaskan variable penelitian serta definisi operasionalnya, populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV merupakan Bab Hasil dan Analisis, dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal, antara lain : Deskripsi Objek Penelitian, Hasil Analisa data, dan Interpretasi hasil.

Bab V merupakan Bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Pada era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian setiap daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing.

Untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat tersebut, daerah memerlukan suatu instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah dalam 1 (satu) periode. APBD memuat segala bentuk penerimaan dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter atau Rupiah.

Sumber-sumber penerimaan sebagaimana yang telah dijelaskan di UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan, yaitu :
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - c. Dana Bagi Hasil
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2.1.2 Belanja Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rinciannya bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk

pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.

Pada hakekatnya pengeluaran pemerintah daerah menyangkut dua hal (anggaran *line item*), yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran rutin, seperti pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, Angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka.
2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain.

Adanya perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) diterangkan sebagai berikut :

1. Belanja aparatur daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Kemudian perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.
2. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan sumber-sumber dari PAD, namun PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah (Hariyanto, 2005).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2001):

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:
 - a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
 - c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil

perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - b. Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
 - d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
4. Pendapatan lain-lain yang sah, di lain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik yang berupa materi dalam hal kegiatan bersifat bisnis, maupun non materi dalam hal kegiatan tersebut untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan statu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan

program otonomi. Dana perimbangan meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai bagi hasil penerimaan pajak.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya.

2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesobroto, 1993; 169):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.

2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.

3. Teori Peacock & Wiseman.

2.1.5.1 Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

2.1.5.2 Hukum Wagner

Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesobroto, 1993; 170). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Berikut formula hukum Wagner :

$$\frac{PkPP1}{PPK1} \quad \frac{PkPP2}{PPK2} \quad \dots \quad \frac{PkPPn}{PPKn}$$

Keterangan :

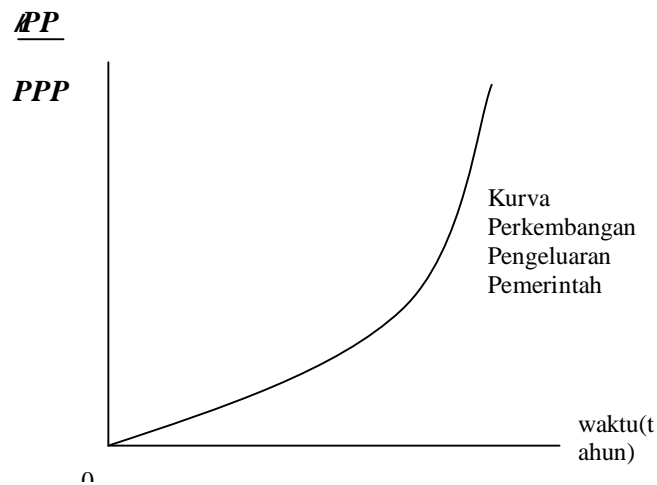
P PP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar 2.1 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993; 172).

Gambar 2.1
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



2.1.5.3 Teori Peacock and Wiseman

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesoebroto, 1993; 173). Teori mereka sering disebut sebagai *The Displacement Effect*, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak

suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Dalam Mangkoesobroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

2.1.6 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah akan mempengaruhi belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend* hipotesis (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von Furnsternberg et al, 1986 dalam Syukriy Abdullah dan Abdul Halim, 2003). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran (Bambang Prakoso, 2004).

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada

pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Rahmawati, 2010).

Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Jadi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin tinggi daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

2.1.7 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh *grants* dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, 2004). Holtz-Eakin, *et al* (1985) dalam Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan Sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dimana pengaruh tersebut memiliki pengaruh yang positif.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Nur Indah Rahmawati

Penelitian dengan judul ' Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Jawa Tengah '. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 daerah di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007 hingga 2009. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi . Alat yang digunakan penelitian adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.

2.2.2 Ronald hariyanto Tahun 2005

Dalam penelitiannya Ronald Hariyanto mengambil judul tentang "Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Periode 2000-2002".

Hasil Penelitian yaitu :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), mempunyai koefisien positif sebesar 0.14, yang berarti setiap ada kenaikan jumlah PAD pada masing-masing daerah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan tingkat pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah sebesar 1,4%, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*).

2. Variabel Dana Perimbangan (X_2), mempunyai koefisien positif sebesar 0.9, yang berarti setiap ada kenaikan jumlah Dana Perimbangan pada masing-masing daerah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan tingkat pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah sebesar 0,9%, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*).
3. Variabel Jumlah Penduduk (X_3), mempunyai koefisien positif sebesar 2.50, yang berarti setiap ada kenaikan jumlah penduduk pada masing-masing daerah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan tingkat pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah sebesar 2,5%, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*).

2.2.3 Kesit Bambang Prakosa Tahun 2004

Di dalam penelitian Kesit Bambang, tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah, Studi Empirik Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY menyatakan bahwa bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah baik dengan maupun tanpa lag. Ketika tidak menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD.

Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dari hasil

penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi BJD, daya prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect*.

2.2.4 Widiyanto Tahun 2004

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/kota Di Propinsi DIY dan Jawa Tengah”. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan hubungan yang erat antara perubahan DAU dan PAD terhadap perubahan belanja daerah baik pada saat dilakukan regresi sederhana (dengan atau tanpa lag) maupun dengan regresi berganda hampir sama pengujian menunjukkan hubungan yang signifikan positif, yang bermakna bahwa apabila terjadi peningkatan pada DAU dan PAD maka akan diikuti peningkatan pada belanja daerah. Pada saat hasil dari masing-masing pengujian itu dibandingkan satu sama lain, terlihat bahwa nilai t-statistik, f-statistik, R, R², dan Adjusted-R² pada masing-masing variabel, DAU memiliki nilai yang lebih besar daripada PAD, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh perubahan besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah kab/kota di propinsi DIY dan Jawa Tengah terhadap besarnya belanja daerah.

2.2.5 Purbayu Budi Santosa Tahun 2005

Penelitian ini menggunakan judul tentang “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri” PAD sebagai salah satu

penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Faktor-faktor tersebut meliputi : pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB. Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data runtut waktu periode 1989-2002. Model estimasi yang digunakan adalah regresi berganda yang ditransformasikan ke bentuk logaritma.

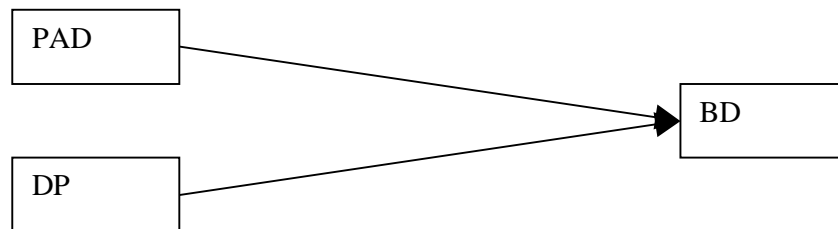
Hasil regresi menunjukkan bahwa ternyata variabel Pengeluaran Pembangunan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,398. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Pengeluaran Pembangunan sebesar 1 persen maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,398 person (faktor lain dianggap konstan). Variabel Penduduk mempunyai koefisien regresi sebesar 8,049. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel Penduduk sebesar 1 person maka akan meningkatkan PAD sebesar 8,049 person (faktor lain dianggap konstan). Variabel PDRB mempunyai koefisien regresi sebesar 0,573. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 person maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,573 person (faktor lain dianggap konstan).

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada analogi dan penelitian-penelitian terdahulu dengan penyesuaian teori-teori yang berlaku bahwa PAD, dana perimbangan, PDRB, dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu belanja daerah.

Adapun untuk skema dan variabel-variabel penelitian pada gambar 2.2. Analisis belanja daerah di Kabupaten dan Kota Jawa Tengah, sebagai berikut

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran Analisis Belanja Daerah



Keterangan :

- BD = Belanja Daerah
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DP = Dana Perimbangan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian analisis belanja daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah
2. Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan belanja daerah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD dan dana perimbangan.

Definisi operasional variabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. **Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah tersebut. Data yang digunakan yaitu data dalam angka menurut Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dengan satuan hitung miliar rupiah.

2. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Data yang digunakan adalah dalam angka menurut Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dengan satuan hitung miliar rupiah.

3. **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana perimbangan meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah dalam angka menurut Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dengan satuan hitung miliar rupiah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dengan jenis *time series data* dan *cross section data* (data panel) dalam bentuk tahunan. Data kuantitatif terdiri dari belanja daerah PAD dan dana perimbangan. Data *time series* yang digunakan dimulai dari periode 2004 sampai 2009 (6 tahun). Sedangkan data *cross section*-nya adalah 35 daerah Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah. Dari penggabungan dua jenis data tersebut telah menghasilkan 210 observasi.

Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kabupaten dan Kota dalam Angka menurut Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah (terbitan Badan Pusat Statistik) dan pencatatan secara langsung di kantor BPS.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka sebagai metode pengumpulan

data, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2004 – 2009. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal-jurnal ekonomi surat kabar, serta dari browsing website internet yang terkait dengan analisis belanja daerah.

3.4 Metode Analisis

Sesuai tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini menggunakan analisis panel data. Analisis panel data adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*timeseries*) dengan data antar individu (*cross section*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003). Regresi dengan menggunakan data panel memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross section* dan *time series*, diantaranya:

1. Data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas dimana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
2. Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja.
3. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan data jenis panel yaitu permasalahan autokorelasi dan heterokedastisitas. Sementara itu ada permasalahan baru yang muncul seperti korelasi silang (*cross-correlation*) antar unit individu pada periode yang sama.

Dalam analisis model panel data dikenal tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan kuadrat terkecil (*Pooled Least Square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*).

3.4.1 Estimasi Model

Hubungan antar variabel secara fungsional dinyatakan sebagai berikut :

$$\mathbf{BJ} = \mathbf{f}(\mathbf{PAD}, \mathbf{DP}) \dots \dots \dots (3.1)$$

Secara umum bentuk utama regresinya adalah :

$$\mathbf{BJ}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{PAD}_{it} + \beta_2 \mathbf{DP}_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan :

BJ = Belanja daerah

PDRB = Produk Domestik Bruto

PAD = Pendapatan Asli Daer

e_{it} = residual secara menyeluruh

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien penjelas masing-masing input nilai parameter Y / Belanja daerah

3.5 Pengujian Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian ini akan menggunakan *auxiliary regressions* dan *Klien's rule of thumb* untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 *auxiliary regressions* maka di dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

3.5.2 Uji Autokorelasi

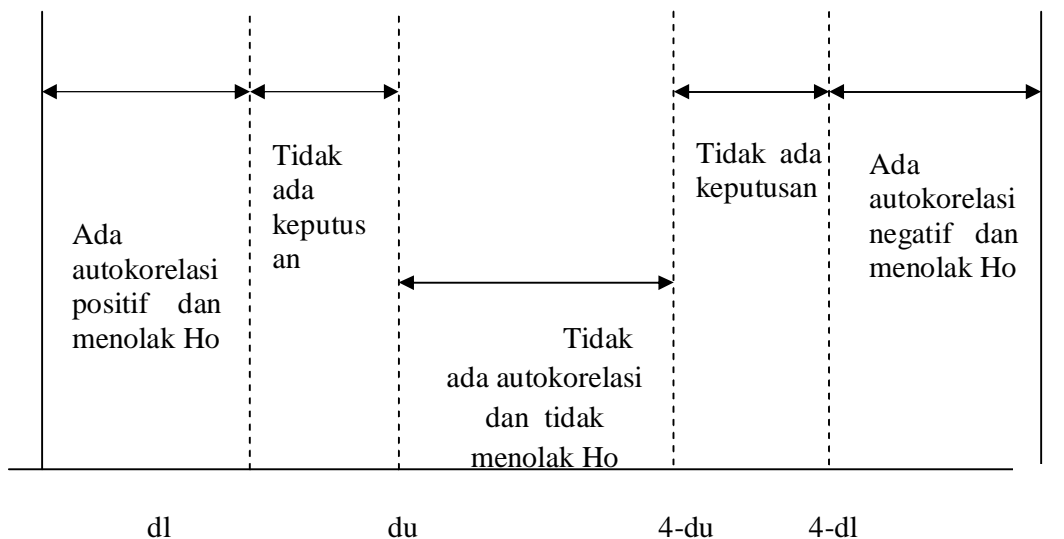
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross-sectional*). Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang (sebelumnya). Pengujian menggunakan uji Durbin Watson untuk melihat gejala autokorelasi.

Tabel 3.1
Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada atokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negative	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$du < d < 4-du$

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.2
Kriteria Pengujian Durbin-Watson



3.5.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas berarti variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi homoskedastisitas yaitu variasi residual sama untuk-semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedastisitas maka penaksir OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak

lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (yaitu *asimtotik*). Menurut Gujarati (2003) bahwa masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data *cross section* dibandingkan dengan data *time series*.

3.5.4 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengambilan kesimpulan dengan Jargue-Bera test atau J-B test. Bila nilai J-B hitung $>$ nilai χ^2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual μ berdistribusi normal dapat ditolak. Bila nilai J-B hitung $<$ nilai χ^2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual μ berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

3.6 Pengujian Kriteria Statistik

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (*estimator*) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2003). Uji statistik terdiri dari koefisien determinasi *Goodness of fit test* (R^2), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien regresi parsial (uji t).

3.6.1 Koefisien Determinasi *Goodness Of Fit Test* (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variable dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang di jelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2003). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\sum (y^* - \bar{y})^2}{\sum (y - \bar{y})^2} \quad (3.3)$$

Keterangan :

y^* = nilai y estimasi

y = nilai y aktual

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variable independen yang dimasukkan dalam model.

Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variable-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variable tidak bebas dan sangat terbatas.
- Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variable-variabel bebas dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variable tidak bebas.

3.6.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah, dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = 0$$

$$H_1 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots \neq 0$$

Kriteria pengujiannya apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu.

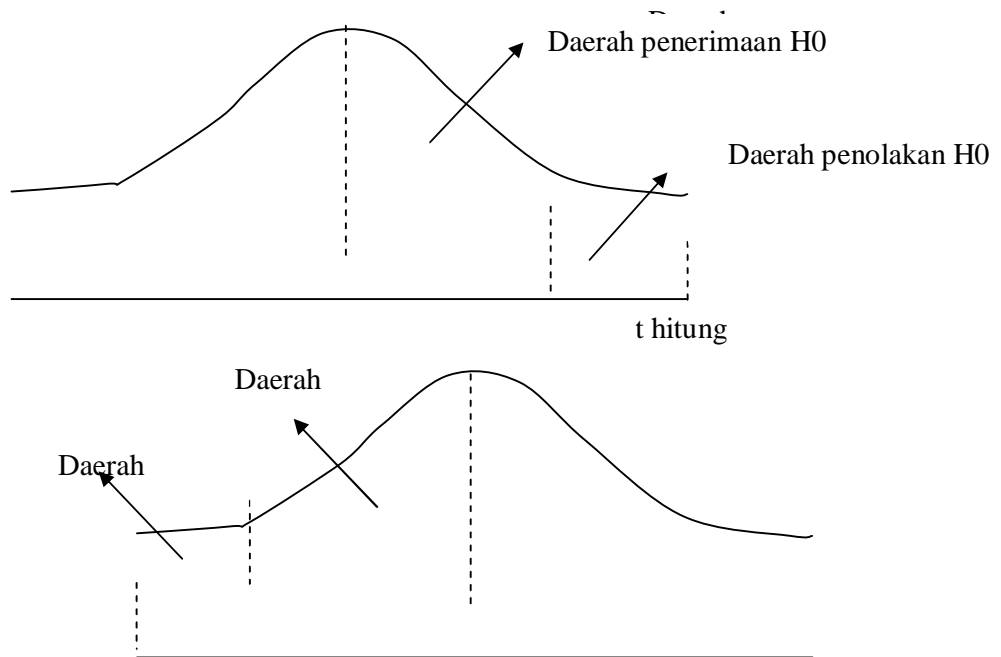
3.6.3 Uji Signifikansi parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila $p\text{-value} < 5\%$ (Ghozali, 2005).

Gambar 3.3
Pengujian Hipotesis secara Searah (One Tail Test) $\alpha = 0,05$



Sumber: Gujarati, 2003